

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akub, Syukuri M., 2012, *Wawasan Due Proses Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Ali, Zainal, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Araf, Al dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful , 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basah, Sjachran 1995, *Mengenal Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Erna dan Firganefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dinamika dan Perkembangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti ND dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Falaakh, Muhamad Fajrul dkk, 2001, *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Handoyo, Cipto Hestu B., 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Herniarti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia (tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej, O.S Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Istanto, F Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- J.P. Chaplin, 2004, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2017, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kuffal, HMA, 2002, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang.
- Labotorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1997, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.D Mahfud M., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- _____ 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Manan Bagir , 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta.
- Manullang, Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhamad Rusli, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhjad, M Hadin dan Nuswardani, Nunung, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung.
- Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Raharjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saifuddin, Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salam, Moch Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Simanjuntak Osman, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soeprapto Indrati Fahrida Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Srimarsita BD., et al, 2000, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Sударsono, 1999, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W. 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suseno, Franz Magnis, 1979, *Etika dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Jakarta.

Wahjono Padmo, 1991, *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, Majalah Forum Keadilan Nomor 29.

Zein Ahmad Yahya *et all*, 2016, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*, Thafa Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang *Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia*.

Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang *Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang *Pengadilan Tentara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang *Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara dengan Keadaan Sekarang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1947 tentang *Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara dengan Keadaan Sekarang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1950 Tentang *Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" (Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal*, Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 52.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 tentang *Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal*, Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3324.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang *Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksanaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Hukum Disiplin Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5591.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang *Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksanaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948 tentang *Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 dari Hal Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Panglima TNI Nomor 5/II/2009 tentang *Petunjuk Administrasi, fungsi dan peran Oditur*.

Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2017 tentang *Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia*.

Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Nama, Tempat kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jendral dan Oditurat Militer Pertempuran*.

C. Karya Ilmiah

Marcus Priyo Gunarto, 2000, *Redefinisi Perbuatan Pidana pada Peradilan Militer*, Makalah disampaikan pada Semiloka Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, FH UGM, Yogyakarta.

Misran Wahyudi, 2015, “Independensi Oditur Militer Tentara Nasional Indonesia dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Nindyo Pramono, 2011, “Tugas dan Wewenang Oditurat Militer Tinggi Jakarta dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perbankan Studi Kasus pada Kantor Oditurat Militer Tinggi Jakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Noviawati Evi, “Laandasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal*, Volume 6, No. 1, Maret, 2018.

PLT Sihombing, 2007, ”Perbandingan Sistem Peradilan Militer” Makalah pada Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional bagi Perwira Jajaran Peradilan Militer TNI, Kerja sama antara Dephan-FRR Kedutaan Besar Kanada di Medan-Denpasar-Ujung Pandang.

Supriyadi, 2015, “Reformulasi Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Umum oleh Militer di Indonesia” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Utomo Aji Nurrahman, “Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.

D. Internet

Persamaan kata dari pelimpahan, <https://kbbi.web.id/pelimpahan>, diakses 6 September 2019.

Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan lembaga penuntutan, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses 10 Februari 2020.

Satu dari lima kesalahan atau kekurangan dalam peradilan militer, <http://jaringannews.com?TNI-pelaku-pidana-umum-jangan-diadili-di-pengadilan-militer.jaringannews.Online.html>, diakses 15 Desember 2019.